



Webinar Nasional & Call For Paper :

Smartpreneur 5.0: Cloud Accounting sebagai Rahasia Keberlanjutan Bisnis

25 Juni 2025

Vol. 4 No. 2 Tahun 2025

No. ISSN : 2809-6479

Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

Donny Indradi, Jasmi Indra, Mulyer Mananda Setyahadi

dosen01149@unpam.ac.id, dosen00265@unpam.ac.id, dosen01111@unpam.ac.id

Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the important sources of regional income in supporting development and public services. This study aims to analyze the potential and effectiveness of PKB collection in Indonesia, especially West Java in the context of PKB management in the period 2021 to 2023. The research method used is quantitative descriptive and secondary data analysis from related agencies. The results of the study indicate that PKB has the potential to increase tax revenue with an average of IDR 530,278,616,555 per year, and the Management of Motor Vehicle Tax carried out by the West Java provincial government is very effective, meaning it is able to manage PKB for development. There are various obstacles such as low levels of taxpayer compliance, limitations of the digitalization system, and lack of socialization. Therefore, an optimization strategy is needed in the form of improving digital services, public education, and providing incentives to encourage timely tax payments. Optimization of PKB not only increases regional revenue, but also supports orderly vehicle administration and traffic safety and the development of West Java.

Keywords: Motor Vehicle Tax; Local Original Income; Regional Tax; West Java Province

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan efektivitas, dari pemungutan PKB di Indonesia, khususnya Jawa Barat dalam rangka pengelolaan PKB pada rentang waktu tahun 2021 sampai dengan 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan analisis data sekunder dari instansi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKB mempunyai potensi kenaikan penerimaan pajak dengan rata-rata Rp 530.278.616.555 per tahun, dan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan pemprov Jabar sangat efektif yang berarti mampu mengelola PKB untuk pembangunan. Terdapat berbagai kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sistem digitalisasi, serta kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi optimalisasi berupa peningkatan pelayanan digital, edukasi masyarakat, dan pemberian insentif untuk mendorong pembayaran pajak tepat waktu. Optimalisasi PKB tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mendukung tertib administrasi kendaraan dan keselamatan lalu lintas dan pembangunan Jawa Barat.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Asli Daerah; Pajak Daerah; Provinsi Jawa Barat



Webinar Nasional & *Call For Paper* :

Smartpreneur 5.0: Cloud Accounting sebagai Rahasia Keberlanjutan Bisnis

25 Juni 2025

Vol. 4 No. 2 Tahun 2025

No. ISSN : 2809-6479

I. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat (disingkat Jabar) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Provinsi ini memiliki peran penting secara ekonomi, budaya, dan geografis di Indonesia. Jabar yang mempunyai Ibu kota yaitu Bandung dengan Luas wilayah: $\pm 35.000 \text{ km}^2$ dan Jumlah penduduk: Lebih dari 50 juta jiwa (provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk di Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya, potensi penerimaan dari sektor ini semakin besar dan strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah, pelayanan publik, serta perawatan infrastruktur transportasi.

Di Jawa Barat, pengelolaan PKB dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan kepolisian dan Jasa Raharja melalui sistem administrasi terpadu yang disebut Samsat. Meskipun pendapatan dari PKB terus mengalami peningkatan, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kendaraan tidak melakukan registrasi ulang (ranmor bodong), serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembayaran dan pendataan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti penerapan e-Samsat, program pemutihan pajak, serta kampanye sadar pajak kepada masyarakat.

Namun demikian, efektivitas dari upaya-upaya tersebut masih perlu dikaji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa target penerimaan pajak tercapai dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pemungutan PKB di wilayah ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan analisis terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain.
2. Retribusi Daerah: Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah, seperti retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti pendapatan dari penyewaan tanah dan bangunan daerah.



Webinar Nasional & Call For Paper :

Smartpreneur 5.0: Cloud Accounting sebagai Rahasia Keberlanjutan Bisnis

25 Juni 2025

Vol. 4 No. 2 Tahun 2025

No. ISSN : 2809-6479

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Pendapatan lain-lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti pendapatan dari penjualan barang milik daerah.

Dengan demikian, pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah, kualitas pelayanan publik, dan pembangunan daerah

2. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi masing-masing terkait tarif dan pelaksanaan PKB.
3. Peraturan Gubernur atau kepala daerah lain yang menjelaskan teknis pengelolaan dan pembayaran PKB.

Dasar hukum ini memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola pajak ini, termasuk menetapkan tarif dan mekanisme pemungutan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pengertian

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak ini meliputi kendaraan bermotor roda dua, roda empat, maupun kendaraan berat yang digunakan di jalan.

PKB berfungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi. Selain itu, PKB juga memiliki fungsi regulatif, yaitu untuk mengendalikan jumlah kendaraan di jalan dan dampak lingkungan.

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Beberapa regulasi yang menjadi dasar pengenaan PKB di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Efektivitas Pajak

Pengertian

Efektivitas pajak merupakan ukuran sejauh mana potensi pajak yang seharusnya diterima oleh negara berhasil direalisasikan melalui sistem perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2016), efektivitas pajak dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas, semakin optimal kinerja sistem perpajakan suatu negara atau daerah.

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2010:13) Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kuantitatif deskriptif dimana dapat didefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data skunder yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah, data statistik dan open data bapenda Jabar. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dengan cara pengumpulan data online dan kepustakaan.



Webinar Nasional & Call For Paper :

Smartpreneur 5.0: Cloud Accounting sebagai Rahasia Keberlanjutan Bisnis

25 Juni 2025

Vol. 4 No. 2 Tahun 2025

No. ISSN : 2809-6479

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Jawa Barat adalah pusat industri dan manufaktur, terutama di kawasan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Pendapatan Asli Daerah adalah sangat penting karena bertujuan agar Daerah Jawa Barat lebih mandiri dan fleksibel dalam mengelola daerah.

Sumber dari PAD Salah satu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak tahunan yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan tersebut, baik itu mobil maupun sepeda motor.

Tabel 4.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Barat 2021 - 2023

Tahun	Unit	Kenaikan
2021	16.397.644	
2022	16.574.299	176.655
2023	16.750.904	176.605

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa pada tahun 2022 telah terjadi kenaikan kendaraan bermotor sebanyak 176.655 unit kendaraan bermotor sedangkan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 176.605 unit kendaraan bermotor

Tabel 4.2. Target Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Barat 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Kenaikan (Rp)	Prosentase (%)
2021	7.860.554.777.000		
2022	8.682.220.100.241	821.665.323.241	10,45%
2023	9.006.038.416.156	323.818.315.915	3,73%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa pada tahun 2022 telah terjadi kenaikan target pajak kendaraan bermotor sebanyak 10,48 % sebesar Rp 821.655.323.241 sedangkan tahun 2023 mengalami kenaikan target pajak kendaraan

bermotor sebesar 3,73 % sebesar Rp 323.818.315.915

Tabel 4.3. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Barat 2021-2023

Tahun	PKB (Rp)	Kenaikan (Rp)	Kenaikan (%)
2021	8.179.965.230.060		
2022	8.900.036.938.612	720.071.708.552	8,09%
2023	9.201.226.492.084	301.189.553.472	3,27%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa pada tahun 2022 telah terjadi kenaikan realisasi pajak kendaraan bermotor sebanyak 8,09 % sebesar Rp 720.071.708.552 sedangkan tahun 2023 mengalami kenaikan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 3,27 % sebesar Rp 301.189.553.472

Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat 2021-2023

Tahun	PAD (Rp)	Kenaikan (Rp)	Kenaikan (%)
2021	20.985.273.316.808		
2022	23.986.150.468.697	3.000.877.151.889	14,30%
2023	24.605.185.944.998	619.035.476.301	2,58%

Sumber : opendata bapenda jabar

Dapat dilihat di tabel 4.4 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 14,30 % atau Rp 3.000.877.151.889 sedangkan tahun 2023 mengalami kenaikan Pendapatan asli Daerah sebesar 2,58 % sebesar Rp 619.035.476.301

Tabel 4.5. Kriteria Efektivitas

PROSENTASE (%)	KRITERIA
> 100 %	SANGAT EFEKTIF
90 – 100 %	EFEKTIF
80 – 90 %	CUKUP
60 – 80 %	KURANG EFEKTIF
< 60 %	TIDAK EFEKTIF

Sumber : DendaRI. KenmendaRI No. 690.900.329



Webinar Nasional & Call For Paper :

Smartpreneur 5.0: Cloud Accounting sebagai Rahasia Keberlanjutan Bisnis

25 Juni 2025

Vol. 4 No. 2 Tahun 2025

No. ISSN : 2809-6479

Tabel 4.5 adalah tabel yang merupakan idikator dari pengelolaan dana Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat.

Tabel 4.6. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Barat 2021-2023

Tahun	REALISASI	KENAIKAN (RP)	POTENSI (%)
2020	7.610.390.642.717		
2021	8.179.965.230.060	569.574.587.343	7,09%
2023	9.201.226.492.084	301.189.553.472	3,27%

Berdasarkan tabel 4.6, pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan realisasi pajak yang berarti adanya potensi penerimaan pajak sebesar 569.574.587.343 atau setara dengan 6,96% dari tahun 2020 , pada tahun 2022 terdapat adanya potensi penerimaan pajak 720.071.708.552 atau setara dengan 8,09% dari tahun 2021 sedangkan pada tahun 2023 potensi penerimaan pajak sebesar 301.189.553.472 atau setara dengan 3,27% dari tahun 2022 .

Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor telah terjadi penurunan potensi pajak tahun 2022 ke 2023 dari 8,09% menjadi 3,27% diantaranya Tingkat pendapatan wajib pajak, sosialisasi, inflasi dan lain-lain.

Tabel 4. 7. Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	REALISASI	KENAIKAN (RP)	KENAIKAN (%)	kriteria
2021	8.179.965.230.060	569.574.587.343	104,06%	SANGAT EFEKTIF
2022	8.900.036.938.612	720.071.708.552	102,51%	SANGAT EFEKTIF
2023	9.201.226.492.084	301.189.553.472	102,17%	SANGAT EFEKTIF

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.7 , dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat disampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat sangat efektif dalam pengelolaan PKB dimana mengalami

kenaikan dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor adapun tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan penerimaan pajak karena pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penghapusan denda pajak.

V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil peelitian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sangat besar untuk semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor.
 2. Pemerintah Provinsi jawa Barat telah melakukan pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang sangat efektif.
- Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh Peneliti adalah sebagai berikut :
1. Guna memningkatkan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor perlu adanya pembuktian bahwa Pajak Bermotor digunakan sesuai untuk kepentigan Masyarakat seperti perbikan jalan, sosialisasi pajak kendaraan bermotor, mempermudah layanan pembayaran pajak.
 2. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor yang sangat efektif dapat terus ditingkatkan dengan pembuktian terhadap pengelolaan dan tidak adanya korupsi, Pembangunan jalan, perbaikan jalan bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, Sri. Donny Indradi, Sapta Setia Darma, Wiwit Irawati (2022). *Mengenal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) lebih dalam.* Surabaya: CiptaMedia Nusantara.



Webinar Nasional & Call For Paper :

Smartpreneur 5.0: Cloud Accounting sebagai Rahasia Keberlanjutan Bisnis

25 Juni 2025

Vol. 4 No. 2 Tahun 2025

No. ISSN : 2809-6479

- Indradi, Donny. Sri Agustini, Rudi. (2023). Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 11(2).178-188.
- Irfani, S.F, Dyah Probowulan, Didik Eko P. (2019). Efektivitas, Daya Pajak dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso. *International Journal of Social Science and Business*.3(2).104-109
- Islami, Debby, Lilik Rahmawati. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. *OECONOMICUS Journal Of Economics*.2(2).169-179.
- Karina, Nurul. Novi Budiarso. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 4(1).715-722
- Malombeke, Novelia. (2023). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*. 4(1).645-655.
- Rumaizha, Riri, Gumirza Bunga Pertiwi. (2024). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)*. 10(1).125-133.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND. Alfabeta. Bandung